# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik. Namun permasalahan pajak di Indonesia terus berlangsung, padahal pajak merupakan kewajiban masyarakat sebagai warga negara, tetapi masih banyak warga negara yang tidak membayar pajak. Bahkan banyak wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak Hal ini jelas merugikan negara.

Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi, distribusi pendapatan, dan perlindungan industri dalam negeri. Dalam konteks dunia usaha, kebijakan pajak mempengaruhi berbagai aspek operasional perusahaan, mulai dari perencanaan keuangan, pengelolaan arus kas, strategi investasi, hingga keputusan harga jual produk.

Bagi perusahaan, pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, pajak dapat menjadi beban yang cukup signifikan, terutama bagi perusahaan menengah dan kecil seperti CV (Commanditaire Vennootschap). Beban pajak yang tinggi dapat mengurangi laba bersih perusahaan, menurunkan kemampuan investasi, dan

bahkan menghambat pertumbuhan usaha secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memahami kebijakan perpajakan dan bagaimana implementasinya dapat berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang sehingga dengan cara ini kejujuran dari wajib pajak sangat diperlukan dalam rangka pemungutan pajak. Wajib pajak disini harus mendaftarkan diri terlebih dahulu pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

CV Hiray, sebuah usaha yang bergerak di bidang makan dan minuman atau sama halnya café dan resto yang menyajikan berbagai makanan dan minum kepada pelanggan, misalnya perdagangan umum, distribusi barang, atau lainnya jika diketahui], merupakan salah satu badan usaha yang beroperasi di Kota Parepare. Kota ini merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki peran penting dalam perdagangan regional. Sebagai perusahaan lokal, CV Hiray tentu tidak luput dari pengaruh kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, khususnya kebijakan perpajakan.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian negara. Kebijakan ini mencakup pengaturan penerimaan (seperti pajak) dan pengeluaran pemerintah yang dapat mempengaruhi berbagai sektor ekonomi,

termasuk sektor bisnis dan perusahaan. Perubahan dalam kebijakan fiskal, seperti peningkatan atau penurunan tarif pajak, subsidi, atau perubahan dalam pengeluaran pemerintah, dapat memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.Kebijakan Pajak, yang mencakup pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara oleh pemerintah, memiliki pengaruh signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk dunia usaha. Kebijakan ini dapat berupa perubahan tarif pajak, pemberian subsidi, insentif fiskal, maupun pengaturan pengeluaran publik.

Teori ekonomi mendefinisikan kebijakan pajak ekspansif sebagai peningkatan subsidi pemerintah. Dengan kenaikan subsidi pemerintah menyebabkan pengeluaran pemerintah meningkat, sehingga mampu mendorong naiknya tingkat investasi. Kebijakan pajak merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah berupa pajak. Dalam keadaan krisis dan kelesuan sektor riil, sumber dana yang diperoleh dari pajak masih kurang, pengambilan utang yang terlalu besar akan mendorong peningkatan biaya bunga dan beban utang dimasa depan. Secara umum kebijakan pajak yang diterapkan di Indonesia sebagai negara berkembang adalah kebijakan yang ekspansif dengan menggunakan instrumen anggaran defisit.

Perbedaan dampak ekonomi yang ada pada kebijakan pajak masih menjadi perdebatan diantara para peneliti. Kelompok pertama

berpendapat kebijakan fiskal dalam pemotongan pajak yang didanai oleh utang dapat meningkatkan pengeluaran konsumen dan mengurangi tabungan nasional. Peningkatan pengeluaran konsumen menyebabkan permintaan agregat lebih besar dan pendapatan lebih tinggi dalam jangka pendek, akibatnya persediaan modal lebih kecil dan pendapatan lebih rendah dalam jangka panjang.

Perubahan dalam kebijakan perpajakan seperti tarif pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), insentif pajak UMKM, atau peraturan pelaporan dan pembayaran pajak dapat berdampak langsung terhadap aktivitas operasional perusahaan. Misalnya, peningkatan tarif PPN dapat meningkatkan harga jual produk, yang pada akhirnya memengaruhi permintaan pasar. Di sisi lain, keringanan pajak atau insentif fiskal dari pemerintah dapat memberikan ruang lebih bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Pembangunan ekonomi daerah dan kualitas pelayanan publik merupakan dua aspek penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Kajian tentang pergeseran struktur ekonomi daerah, misalnya di Kabupaten Pangkep, menunjukkan bahwa identifikasi sektor basis dan sektor potensial sangat diperlukan sebagai landasan perencanaan pembangunan yang (Baharuddin et al., 2022) Sejalan dengan itu, peran sumber daya manusia dan budaya organisasi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian di Kantor Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, di mana budaya organisasi dan kinerja pegawai terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan (Fitriani et al., 2023)

Selain faktor ekonomi makro dan budaya organisasi, strategi pembangunan daerah juga memerlukan dukungan sektor-sektor usaha yang mampu meningkatkan daya saing. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa sektor industri pengolahan dan jasa berperan dalam mempercepat transformasi ekonomi wilayah, sehingga perlu didorong melalui kebijakan pembangunan berbasis potensi local (T et al., 2023). Lebih jauh lagi, penelitian lain menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat serta inovasi daerah dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi (Akhsan et al., 2021)

Dengan demikian, berdasarkan temuan-temuan tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, budaya organisasi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan mengembangkan sektor potensial. Hal ini menunjukkan pentingnya penelitian mengenai kontribusi kredit usaha atau sektor tertentu dalam mendukung perkembangan ekonomi lokal, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia gencar melakukan reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak. Salah satunya adalah penerapan sistem pelaporan pajak berbasis elektronik (e-filing dan e-bupot), serta pemberlakuan pajak final untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tarif yang lebih rendah. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sekaligus mendorong pertumbuhan sektor usaha informal menjadi lebih formal dan teratur.

Namun demikian, dalam implementasinya, tidak semua perusahaan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebijakan pajak tersebut. Tingkat pemahaman manajemen terhadap aturan perpajakan, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan dan akuntansi, serta kemampuan administrasi perusahaan menjadi faktor penentu dalam merespons kebijakan pajak secara optimal. CV Hiray, sebagai perusahaan lokal yang berada pada skala menengah, tentu memiliki tantangan tersendiri dalam hal ini.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara singkat dengan pihak manajemen CV Hiray, diketahui bahwa perusahaan ini mengalami fluktuasi dalam perolehan laba bersih dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor yang diduga memiliki kontribusi terhadap kondisi ini adalah beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Selain itu, proses administratif dan pelaporan pajak yang kompleks juga dinilai menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

Penelitian ini menjadi relevan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kebijakan pajak dengan kinerja operasional dan profitabilitas perusahaan. Dengan memfokuskan pada studi kasus CV Hiray, penulis berharap dapat menggambarkan secara konkrit bagaimana kebijakan fiskal pemerintah, khususnya di bidang perpajakan, berimplikasi terhadap aktivitas bisnis sehari-hari, efisiensi operasional, dan pencapaian laba perusahaan. Secara umum, ada beberapa indikator yang akan dijadikan fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis kebijakan pajak yang diberlakukan kepada CV Hiray (misalnya PPh Badan, PPN, pajak final UMKM)
2. Pengaruh kebijakan tersebut terhadap operasional perusahaan, misalnya perubahan biaya produksi, perubahan dalam prosedur administrasi, atau dampaknya terhadap manajemen keuangan.
3. Dampak terhadap laba bersih perusahaan, baik secara langsung (melalui pengurangan laba akibat pajak) maupun tidak langsung (misalnya pengaruh pada volume penjualan atau efisiensi biaya).

CV hiray kota parepare merupakan salah satu yang terdaftar pada kebijaka pajak kota parepare. Dimana sejak berdirinya CV hiray kota parepare telah berkontribusi dalam pertumbuhana ekonomi yang ada di kota parepare. CV hiray merupakan salah satu usaha mikro yang telah beroperasi hingga saat ini. Dalam kebijakan fiskal yang berikan oleh pemerinta kepada CV hiray ini membuat laporan keuangan harus di

susun dengan baik dan benar, mengingat hal tersebut dapat memberikan dampat yang baik ataupun buruk jika laporan keuangan tidak dikelolah dengan baik. Oleh nya itu peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul **"dampak Kebijakan Pajak terhadap Operasional dan Laba Perusahaan (Studi Kasus CV Hiray Kota Parepare".**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu Bagaimana dampak kebijakan pajak terhadap kegiatan operasional dan Laba CV Hiray di Kota Parepare?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis dampak kebijakan pajak terhadap kegiatan operasional dan Laba CV Hiray di Kota Parepare.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat dan kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini baik dalam keguanaan teoritis dan kegunaan praktis adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan dan manajemen keuangan perusahaan, dengan menambahkan referensi empiris mengenai pengaruh kebijakan pajak terhadap aspek operasional dan laba perusahaan, khususnya pada perusahaan skala menengah seperti CV.

2. Manfaat Praktis

Bagi Perusahaan (CV Hiray**):**Memberikan informasi dan masukan yang berguna dalam menyusun strategi pengelolaan pajak yang lebih efisien serta meningkatkan kinerja keuangan perusahaan melalui pengambilan keputusan operasional yang mempertimbangkan aspek perpajakan.

Bagi Pelaku Usaha Lain:Memberikan gambaran tentang pentingnya memahami kebijakan pajak dan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha, khususnya bagi pelaku UMKM dan perusahaan menengah lainnya di wilayah Parepare dan sekitarnya.

Bagi Pemerintah atau Otoritas Pajak**:**Memberikan masukan dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan perpajakan yang lebih adaptif terhadap kondisi riil pelaku usaha, sehingga dapat mendorong kepatuhan pajak dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Kajian Teori

1. Kebijakan pajak

Pajak secara umum adalah iuran wajib dari penduduk kepada Negara berdasarkan undang-undang yang pelaksanaanya dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan langsung, yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan secara nasional

Peran pajak di Indonesia semakin penting karena saat ini pajak merupakan primadona bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatannya dalam rangka pembangunan Nasional.Terbitnya Undang- Undang Perpajakan No.36 tahun 2008 menunjukkan bagaimana pemerintah selalu memperbaharui tata aturan perpajakan agar sistem perpajakan selalu dapat mengikuti perkembangan bisnis dan ekonomi.

Pajak adalah kontribusi wajib yang dikenakan oleh negara kepada individu atau badan usaha berdasarkan ketentuan undang-undang, tanpa adanya imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2020), pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor publik untuk membiayai pembangunan nasional.

Kebijakan pajak adalah serangkaian tindakan atau strategi pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan sistem perpajakan, termasuk penetapan tarif, objek pajak, dan pemberian insentif atau keringanan pajak. Tujuan utama dari kebijakan pajak adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif.

kebijakan pajak juga digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan stabilisasi harga. Dengan demikian, pajak bukan hanya sebagai alat fiskal, tetapi juga sebagai alat regulasi yang mempengaruhi perilaku ekonomi pelaku usaha.

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak.Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan yang menyimpang.

a) Fungsi Budgetair Pajak budgetair merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.
b) Fungsi Regulerend Pajak regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuh mencapai tujuan tertentu.Fungsi regulerend juga disebut

fungsi tambahan, Karena fungsi regulerend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair.

Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pegertian pajak yaitu (Waluyo,2002) a)Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan-aturan pelaksanaanya yang sifatnya dapat dipaksakan. b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi ndividual oleh pemerintah. c) Pajak dipungut oleh Negara. d) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publicinvestment. fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Demokrasi Pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
2. Fungsi Redistribusi Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

Kebijakan pajak dapat dibagi menjadi beberapa bentuk:

1. Kebijakan Tarif Pajak

   Perubahan tarif pajak, baik naik maupun turun, dapat memengaruhi beban usaha dan daya saing suatu perusahaan.

2. Kebijakan Administrasi Pajak

   Menyederhanakan prosedur perpajakan, seperti pelaporan pajak secara daring (e-filing) dan pembayaran otomatis, untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi.

3. Kebijakan Insentif Pajak

   Termasuk di dalamnya pajak final UMKM, tax holiday, tax allowance, dan insentif untuk sektor tertentu.

4. Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

   Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan masa lalu tanpa dikenai sanksi pidana atau denda yang berat.

Penerapan kebijakan pajak harus berpijak pada asas-asas tertentu agar menciptakan sistem yang adil dan efektif. Menurut Adam Smith dalam *The Wealth of Nations*, terdapat empat asas utama:

1. Asas Keadilan (Equity)

   Wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar harus membayar lebih besar pula.

2. Asas Kepastian (Certainty)

   Ketentuan perpajakan harus jelas agar wajib pajak memahami kewajibannya.

3. Asas Kemudahan (Convenience)

   Pajak sebaiknya dipungut pada waktu dan cara yang paling nyaman bagi wajib pajak.

4. Asas Efisiensi (Economy)

   Biaya administrasi pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari pajak yang dikumpulkan.

Kebijakan Pajak dan Dampaknya terhadap Dunia Usaha

Kebijakan perpajakan secara langsung memengaruhi kondisi keuangan dan operasional perusahaan. Sebagai contoh, tarif pajak yang tinggi dapat mengurangi profitabilitas, sementara kebijakan insentif pajak dapat memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pelaku usaha untuk ekspansi.

Menurut Susanti dan Darma (2020), perusahaan kecil dan menengah (UMKM) cenderung sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan pajak. Perubahan dalam tarif atau prosedur pelaporan dapat memengaruhi kelangsungan bisnis mereka.

2. Konsep Dan Teori Operasional Dan Laba Perusahaan

a. Pengertian operasional perusahaan

Operasional perusahaan merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi utama organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Kegiatan ini mencakup proses produksi, pengelolaan sumber daya manusia, manajemen logistik, pemasaran, dan pelayanan konsumen.

(Vera, 2020) menjelaskan manajemen operasional sebagai rangkaian kegiatan transformasi input menjadi output (produksi barang/jasa). operasional perusahaan adalah serangkaian aktivitas yang secara langsung terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan melalui produksi dan penyampaian barang atau jasa. operasional sebagai serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output.

Tujuan dari kegiatan operasional adalah untuk meningkatkan efisiensi, menekan biaya produksi, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan optimal. Operasional yang efektif dan efisien akan berdampak langsung pada pencapaian laba perusahaan.

Menurut Kotler dan Keller (2021), keberhasilan operasional tidak hanya diukur dari kemampuan perusahaan memproduksi barang atau jasa, tetapi juga dari seberapa baik perusahaan dapat memenuhi permintaan pasar dan menciptakan loyalitas pelanggan.

b. Teori operasional perusahaan

Operasional perusahaan merupakan fungsi inti manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian proses transformasi input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Menurut Heizer, Render, dan Munson (2020), manajemen operasional berfokus pada pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk menghasilkan barang atau jasa berkualitas,

sekaligus menciptakan keunggulan kompetitif. Sementara itu, menurut Stevenson (2021), operasional perusahaan dipandang sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal, di mana input berupa bahan baku, tenaga kerja, dan modal diolah melalui proses menjadi output berupa produk atau layanan. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi strategi operasi dengan dinamika pasar dan perkembangan teknologi untuk mempertahankan daya saing jangka panjang. Menurut Heizer, Render, dan Munson (2020), sistem operasional yang efektif harus dirancang adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan secara berkelanjutan, melalui pengelolaan sumber daya dan proses yang responsif.

c. Konsep laba perusahaan

Laba merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2021), laba adalah peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi yang tercermin dari kenaikan aset atau penurunan kewajiban, yang mengakibatkan kenaikan ekuitas selain yang berasal dari kontribusi pemilik. Sementara itu, menurut Warren, Reeve, dan Duchac (2020), laba menggambarkan kinerja operasional perusahaan melalui selisih positif antara pendapatan yang dihasilkan dan beban yang dikeluarkan.

Adapun Jenis-jenis Laba sebagai berikut:

1. Laba Kotor: Pendapatan dikurangi harga pokok penjualan.
2. Laba Operasi: Laba kotor dikurangi beban operasional.
3. Laba Bersih: Laba operasi dikurangi beban bunga dan pajak.
4. Laba Komprehensif: Laba bersih ditambah/kurang pendapatan atau kerugian lain yang belum direalisasi.

Adapun Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Laba sebagai berikut

1. Pendapatan Penjualan
2. Biaya Produksi
3. Efektivitas Operasional
4. Kondisi Eksternal

d. Teori laba menurut ahli

Teori ini menyatakan bahwa laba merupakan sisa pendapatan setelah semua biaya, termasuk biaya modal, dibayarkan. Laba normal adalah tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor sebagai kompensasi atas risiko yang diambil, sedangkan laba abnormal adalah laba yang melebihi tingkat pengembalian wajar tersebut. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2020), laba abnormal biasanya diukur dengan membandingkan tingkat pengembalian aktual terhadap tingkat pengembalian yang diharapkan berdasarkan risiko pasar.Teori Behavioral Accounting Teori ini menjelaskan bahwa persepsi manajer terhadap risiko, insentif, dan tekanan eksternal akan memengaruhi keputusan pelaporan laba. Literatur akuntansi perilaku modern

menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi, sistem pengukuran kinerja, dan faktor psikologis dapat memengaruhi besaran dan waktu pengakuan laba (Libby, Bloomfield, & Nelson, 2021).

e. Hubungan operasional dan laba

Kegiatan operasional yang efisien dan efektif sangat menentukan besarnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Operasional yang dikelola dengan baik dapat menekan biaya, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pelayanan. Menurut Heizer, Render, dan Munson (2020), efektivitas operasional memiliki hubungan positif dengan profitabilitas, karena proses yang optimal mampu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan meminimalkan pemborosan.

## B. Penelitian Terdahulu

Lilis Sholihati, Endang Kiswara (2024) Pengaruh Pajak Penghasilan Badan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Delapan Perusahaan Sektor Kesehatan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2022). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pajak penghasilan badan terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini adalah profitabilitas perusahaan yang diukur dengan return on asset (ROA), return on investment (ROI), dan return on equity (ROE) pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu sebanyak delapan perusahaan sektor kesehatan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode uji non parametrik dengan uji korelasi Spearman dan Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan dengan kinerja keuangan yang diukur dengan ROA setelah perubahan tarif pajak akibat pandemi Covid-19. Selain itu, tidak ada perbedaan signifikan dalam hubungan antara pajak penghasilan dan kinerja keuangan yang diukur dengan ROI dan ROE setelah perubahan tarif pajak.

Ramadhan, M. & Lestari, D. (2019) – *Analisis Dampak Reformasi Pajak terhadap Strategi Operasional UMKM,* Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus pada beberapa pelaku UMKM di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terkait kebijakan perpajakan yang berlaku. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, mengikuti model analisis Miles dan Huberman.Teori yang Digunakan dalam Penelitian ini mengacu pada Teori Kepatuhan Pajak dan Teori Perilaku Organisasi, yang menjelaskan bagaimana perubahan kebijakan fiskal mempengaruhi perilaku dan strategi pelaku usaha kecil dan menengah dalam menjalankan operasional mereka.Hasil penelitian

menunjukkan bahwa reformasi perpajakan, khususnya penurunan tarif PPh final bagi UMKM dari 1% menjadi 0,5%, berdampak positif terhadap keberlangsungan usaha. UMKM menjadi lebih terbuka untuk melakukan pencatatan keuangan secara formal dan merencanakan ekspansi usaha. Namun, respon terhadap reformasi ini sangat bergantung pada tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap kebijakan tersebut. Bagi UMKM yang belum familiar dengan sistem perpajakan, perubahan justru menciptakan kebingungan administratif yang bisa menghambat operasional.

Hidayat, S. (2021) – *Efektivitas Kebijakan Pajak terhadap Kinerja Operasional Perusahaan Konstruksi* ,Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa perusahaan konstruksi di wilayah Jawa Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, serta telaah dokumen keuangan dan perpajakan perusahaan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Teori yang Digunakan dalam Penelitian ini mengacu pada Teori Kepatuhan Pajak, serta Teori Biaya Transaksi, yang menjelaskan bagaimana beban administratif dan fiskal dari kebijakan perpajakan dapat memengaruhi efisiensi operasional dan strategi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pajak terhadap perusahaan konstruksi sangat bergantung pada

kesesuaian antara kebijakan tersebut dan kemampuan administrasi perusahaan. Tingginya tarif pajak dan prosedur administrasi yang rumit dinilai menghambat efisiensi operasional, terutama pada tahap perencanaan proyek dan pengelolaan arus kas. Banyak perusahaan cenderung menunda proyek atau memodifikasi rencana anggaran karena beban pajak yang tinggi, sehingga mengganggu stabilitas operasional secara keseluruhan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyederhanaan kebijakan pajak dan peningkatan literasi perpajakan di sektor konstruksi.

Tomi Mulyana (2024) dengan judul penelitian Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat (r = 0,835) antara kebijakan pajak dan kinerja keuangan perusahaan, dengan nilai determinasi sebesar 69,7% yang mengindikasikan bahwa kebijakan pajak berkontribusi signifikan terhadap variasi kinerja keuangan. Uji hipotesis T juga menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan pajak terhadap kinerja keuangan adalah signifikan pada taraf signifikansi 0,01. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana kebijakan pajak dapat dirancang untuk mendukung kinerja keuangan yang berkelanjutan di sektor manufaktur, terutama dalam konteks dinamika ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan pelaku

bisnis dalam merumuskan strategi fiskal dan keuangan yang lebih efektif guna meningkatkan daya saing dan stabilitas pasar modal Indonesia

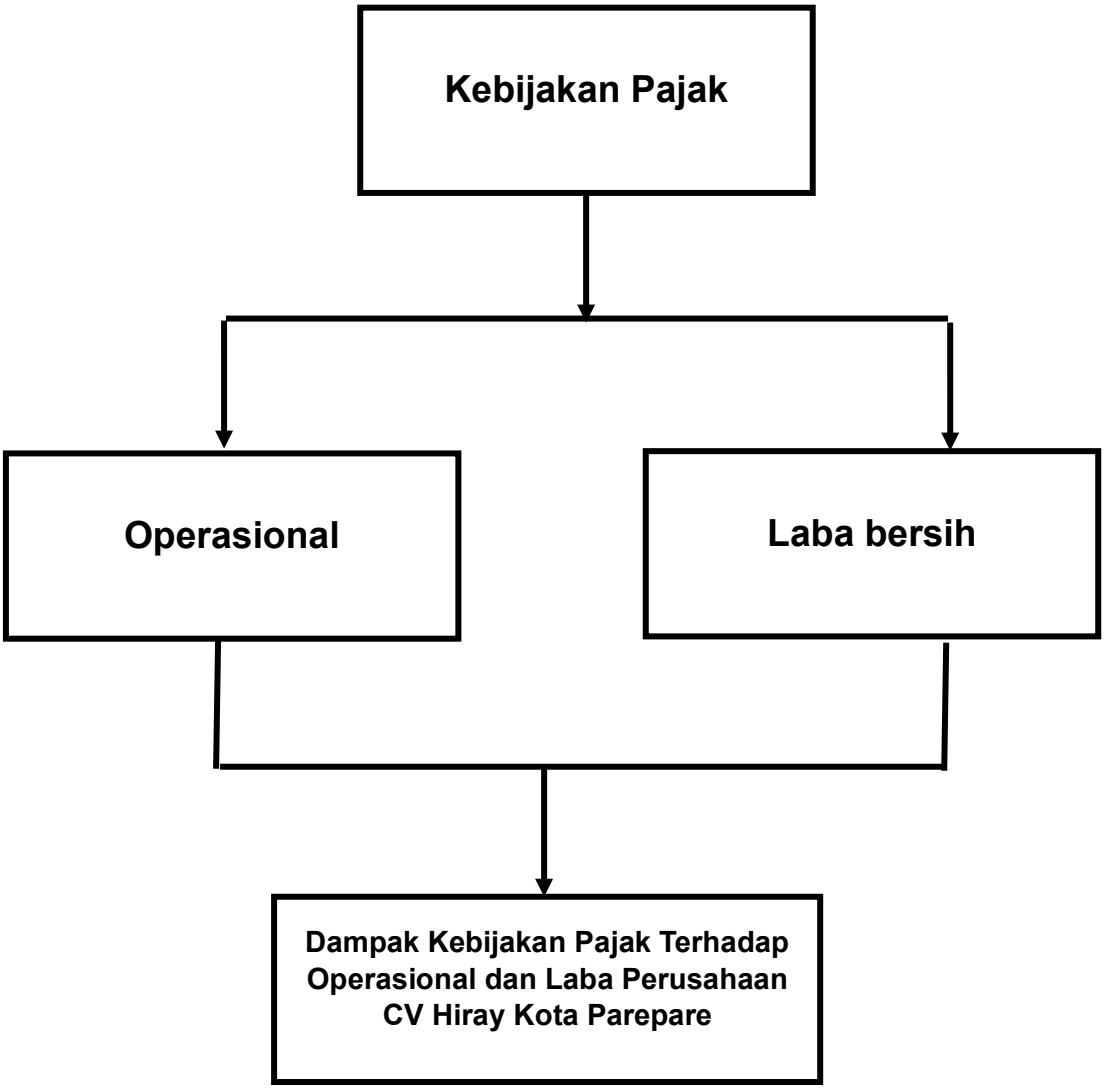
Adinda Putri Desinta, Sarwenda Biduri (2023) Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Go Publik Di Bursa Efek Indonesia. Hasil analisis statistik untuk hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa nilai t hitung 8.084 lebih besar dari nilai t tabel = 2.032 dengan signifikansi 0,000 di bawah nilai a, yaitu sebesar 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima. menunjukkan hasil pengolahan data menggunakan uji beda sampel dua rata-rata dengan siginifikansi 0,05. Hasil analisis statistik untuk hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa nilai t hitung 8.570 lebih besar daripada nilai t tabel = 2.032, dengan signifikansi 0,000 di bawah nilai a, yaitu 0,05, dan hipotesis kedua (H2) diterima.

## C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainya dari suatu masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan.

Kerangka konseptual berasal dari konsep ilmu atau teori, yang digunakan untuk landasan penelitian ilmiah, yang berawal dari tinjauan pustaka. Jadi, kerangka konseptual adalah ringkasan dari tinjauan pustaka

yang dapat menghubungkan dengan garis yang sesuai dengan variabel yang diteliti. Berikut akan digambarkan kerangka pikir.




**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual**

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi untuk mengidentifikasi dampak Kebijakan Pajak terhadap Operasional dan Laba Perusahaan (Studi Kasus CV Hiray Kota Parepare). Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami fenomena atau realitas sosial berdasarkan perspektif partisipan secara mendalam, tanpa mengutamakan angka atau statistik.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemahaman makna, proses, dan konteks dari fenomena yang diteliti. Penelitian ini tidak menggunakan data numerik, melainkan menganalisis data berupa narasi, opini, dan pengalaman partisipan. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan langsung dalam proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta telaah dokumen untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap dampak kebijakan pajak terhadap operasional dan laba perusahaan.

## B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Parepare, Lokasi penelitian sengaja diambil oleh peneliti mengingat CV Hiray Kota Parepare merupakan salah satu tempat yang telah beroperasi sejak lama.

2. Waktu Penelitian

   Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, penulis akan melakukan penelitian selama 1 bulan, dimana peneliti akan melakukan penelitian terkait dampak Kebijakan Pajak terhadap Operasional dan Laba Perusahaan (Studi Kasus CV Hiray Kota Parepare)..

## C. Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan individu yang dipilih secara purposif karena memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Informan bertindak sebagai sumber data utama yang memberikan informasi mendalam melalui wawancara atau observasi. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti latar belakang, peran, atau keterlibatan dalam konteks yang dikaji. Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti, melainkan disesuaikan hingga data yang diperoleh mencapai kejenuhan (data saturation). Dalam penelitian ini, informan terdiri dari 7 informan yakni pimpina, manajer Staff Back Office, Direktur Operasional dan beberapa

karyawan ang dianggap mampu memberikan data yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

**D. Definisi Operasional Variabel**

Menurut Vionalita (2020), definisi operasional sebagai penjabaran variabel-variabel yang diteliti dalam suatu penelitian hingga bersifat operasional sehingga bisa diukur dengan alat ukur penelitian. Definisi operasional bertujuan untuk membatasi ruang lingkup variabel, menyamakan persepsi sehingga memudahkan serta menjaga konsistensi peneliti dalam melakukan pengumpulan, pengukuran, dan analisis data menjadi efisien. Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek, organisasi atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Dampak kebijakan pajak dalam penelitian ini diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan oleh peraturan atau kebijakan perpajakan terhadap kondisi operasional dan kinerja keuangan perusahaan. Dampak tersebut dapat terlihat dari perubahan dalam beban pajak, strategi perpajakan perusahaan, efisiensi operasional, hingga laba bersih yang diperoleh. Secara operasional, variabel ini diukur melalui indikator-indikator seperti:

1. Perubahan beban pajak sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan.
2. Penyesuaian dalam strategi operasional perusahaan sebagai respons terhadap kebijakan pajak.

3. Perubahan pada laporan keuangan, khususnya dalam komponen laba bersih dan pengeluaran perpajakan.
4. Tanggapan manajemen terhadap kebijakan pajak melalui wawancara atau kuesioner.

**E. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah data diperoleh langsung dari informan. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data, data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan data secara langsung, teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer tersebut antara lain wawancara dan observasi
2. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diambil dari para responden akan tetapi melalui dokumen. Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pembahasan kebijakan fiskal, seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan, serta yang lain berupa hasil laporan penelitian dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung dilapangan atau lokasi penelitian untuk melakukan penelitian serta memperoleh data-data konkret yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling tepat dan strategi dalam penelitian ini, sebab tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data yang diinginkan. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengamatan (*Observasi*)

   Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. *Observasi* (Pengamatan) adalah metode pengumpulan data secara pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengucapan yang digunakan untuk menghitung data penelitian.

   Dalam penelitian ini proses pengambilan data melalui pengamatan secara sistematis terhada objek yang diteliti, artinya bukan suatu kebetulan akan tetapi sudah direncanakan. Dalam hal ini meninjau secara langsung kelapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dan ikut serta dalam mengikuti proses yang dialami oleh CV Hiray Kota parepare.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu prsoses untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara peneliti dan pegawai instansi (*Face to face)* dengan berusaha menggali informasi dengan orang yang diwawancarai untuk mendapat informasi real terkait dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti akan mewawancarai pimpinan CV Hiray serta beberapa bawahanya yang ada dalam struktur organisasi.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. Untuk mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

Analisis data pada penelitian kualitatif ini pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di

lapangan. Analisis data adalah pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.

Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi data

   Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyedarhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Adapun tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi: membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci.

   Tahapan reduksi yang dilakukan untuk menelah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai dampak kebijakan pajak terhadap operasional dan laba perusahaan (studi kasus pada CV Hiray, Kota Parepare). Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi, serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

2. Penyajian data

   Penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan kategori, dan sejenisnya. Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh dari penerapan dampak kebijakan pajak terhadap operasional dan laba perusahaan (studi kasus pada CV Hiray, Kota Parepare). sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan dampak kebijakan pajak terhadap operasional dan laba perusahaan.

   Penyajian data dapat dilakukan dengan mengabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dari beberapa sumber data dan dokumentasi. Data yang disampaikan berupa narasi kalimat, dimana setiap penjelasan yang diceritakan ditulis apa adanya. Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh. kegiatan pada tahap ini adalah Membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga sentral dapat diketahui dengan mudah dan Memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi kesimpulan

   proses analisis yang sangat penting adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diperoleh dari rangkaian kegiatan atau

konfigurasi data secara menyeluruh, dan selama proses penelitian berlangsung, kesimpulan tersebut terus diverifikasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap kesimpulan yang telah ditarik, dengan membandingkannya terhadap teori-teori yang relevan, serta melalui proses pemeriksaan ulang yang mencakup tahapan pra-survei (orientasi), wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan akhir kemudian dirumuskan secara menyeluruh untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan.

Untuk menguji keabsahan data dan mengukur validitas hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik dan sumber data yang tersedia. Selain itu, pengamatan lapangan dilakukan secara mendalam dan berkesinambungan, dengan fokus pada topik penelitian, yaitu dampak kebijakan pajak terhadap operasional dan laba perusahaan (studi kasus pada CV Hiray, Kota Parepare). Hasil temuan juga didiskusikan dengan pihak-pihak yang memiliki pemahaman mendalam terkait permasalahan penelitian, guna memperkuat validitas data dan interpretasi.

Dengan demikian, pemahaman terhadap setiap tahapan dalam proses penelitian harus senantiasa mengikuti alur sistematis yang terstruktur dan saling terhubung, agar hasil akhir penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Harapan utama dari keseluruhan proses ini adalah agar kesimpulan yang diambil tetap

memiliki relevansi dan keterkaitan yang kuat dengan data yang telah dikumpulkan, sehingga penelitian yang dihasilkan dapat dianggap sebagai karya ilmiah yang valid dan mewakili realitas yang diteliti.

# BAB IV

# GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

## A. Sejarah

Hiray merupakan salah satu cafe atau resto yang ada di kota parepare . nama hi ray terinspirasi dari putra sulung pemilik cafe , bangunan Hiray berdiri sejak tahun 2019 awalnya hiray hanya berbentuk gerobak kecil yang menyediakan 3 jenis minuman yaitu greentea , thaitea & lemontea .seiring berjalannya waktu pemilik cafe tersebut melakukan inovasi untuk mencoba jualan berbagai macam jenis makanan yang pada awal nya di peruntukan untuk pesanan take away saja dengan jumlah 3 orang karyawan saja . awal tahun 2022 hiray melakukan pengembangan dengan memperluas area bangunan dan menyediakan berbagai macam produk, sampai saat ini hiray telah memiliki 26 jenis minuman dan 25 jenis makanan serta memiliki kurang lebih 50 karyawan. Dengan Visi

1. Menjadi cafe favorit masyarakat dengan kualitas makanan dan minuman terbaik.
2. Membuat pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi setiap pelanggan.
3. Menyajikan makanan dan minuman dengan kualitas tinggi dan harga terjangkau." Adapun Misi

1. Menyajikan pengalaman kuliner yang unik dan memuaskan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas untuk kenyamanan pelanggan.

3. Memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman menyenangkan.

## B. Perkembangan Objek Penelitian

Hiray merupakan salah satu café dan resto yang berkembang pesat di Kota Parepare. Nama “Hiray” terinspirasi dari nama putra sulung pemilik usaha ini, yang menjadi simbol semangat dan harapan dari keluarga untuk membangun sebuah bisnis yang dapat tumbuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Hiray didirikan pada tahun 2019, dan pada awal pendiriannya hanya berupa gerobak kecil yang menjual tiga jenis minuman, yaitu greentea, thaitea, dan lemontea. Konsep usaha pada saat itu sangat sederhana dan lebih berfokus pada penjualan take away dengan jumlah karyawan yang sangat terbatas, yakni hanya tiga orang.

Seiring berjalannya waktu, pemilik café melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan daya tarik dan nilai jual dari produk yang ditawarkan. Inovasi tersebut meliputi penambahan variasi menu makanan, pengembangan resep, serta peningkatan kualitas layanan. Inisiatif ini dilakukan sebagai respon terhadap permintaan pelanggan yang terus meningkat serta tren kuliner di kalangan masyarakat Parepare, khususnya kalangan muda.

Pada awal tahun 2022, Hiray mengalami perkembangan signifikan dengan melakukan ekspansi bangunan dan memperluas area pelayanan. Transformasi dari gerobak sederhana menjadi café yang representatif membuka peluang untuk menyajikan lebih banyak menu dan meningkatkan kapasitas pelayanan. Saat ini, Hiray telah memiliki 26 jenis minuman dan

25 jenis makanan, yang meliputi berbagai varian kopi, minuman kekinian, makanan ringan, makanan berat, dan menu khas lainnya. Jumlah karyawan pun meningkat drastis menjadi sekitar 50 orang, mencakup bagian dapur, pelayanan, kasir, serta tim manajemen dan kebersihan.

Dengan perkembangan yang pesat ini, Hiray tidak hanya berhasil menciptakan brand lokal yang kuat, tetapi juga memberikan kontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru serta memajukan sektor ekonomi kreatif di Kota Parepare. Transformasi ini menjadikan Hiray sebagai objek penelitian yang menarik, khususnya dalam studi mengenai manajemen bisnis UMKM, inovasi produk, strategi pemasaran, dan pengelolaan sumber daya manusia dalam konteks usaha kuliner modern.

## C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan yang sistematis dari berbagai komponen dalam suatu organisasi, yang mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hubungan kerja antar individu maupun antar bagian atau divisi, dengan tujuan untuk menciptakan koordinasi yang efektif dalam menjalankan kegiatan organisasi secara menyeluruh. Struktur ini menggambarkan secara jelas siapa yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan, siapa yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas tertentu, serta bagaimana alur pelaporan dan komunikasi berlangsung di dalam organisasi. Dengan adanya struktur organisasi yang baik, seluruh anggota organisasi dapat memahami peran dan posisi masing-masing, sehingga dapat bekerja sesuai dengan

bidangnya secara terarah, terkoordinasi, dan terukur dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi tersebut.

Tujuan Struktur Organisasi:

1. Menjelaskan Tanggung Jawab dan Wewenang**:** Struktur organisasi bertujuan untuk memperjelas pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing individu atau unit kerja dalam organisasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan peran.
2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kerja**:** Dengan pengaturan struktur yang tepat, kegiatan operasional dapat berjalan lebih efisien dan terkoordinasi dengan baik karena setiap orang mengetahui tugasnya dan siapa yang harus dia hubungi atau laporkan.
3. Membantu Proses Pengambilan Keputusan**:** Struktur organisasi menyediakan jalur komunikasi dan pelaporan yang jelas, sehingga mempermudah pimpinan dalam mengumpulkan informasi dan mengambil keputusan yang tepat.
4. Menciptakan Koordinasi dan Kerjasama**:** Struktur yang terorganisir mendorong terciptanya koordinasi antar bagian dalam organisasi, sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama.
5. Menjadi Landasan Pengembangan Organisasi: Struktur organisasi juga membantu organisasi dalam mengembangkan diri, memperluas

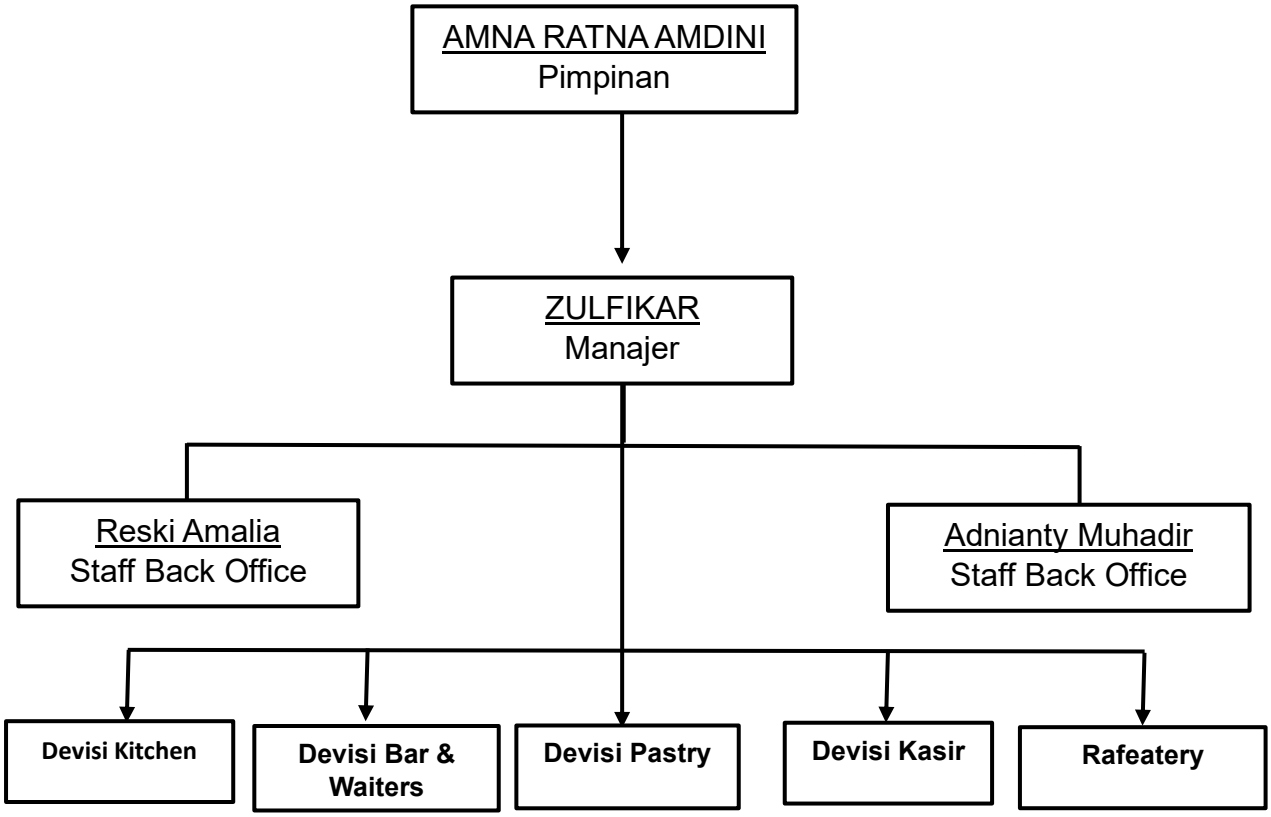
skala usaha, atau melakukan restrukturisasi jika diperlukan untuk menghadapi perubahan lingkungan.

Fungsi Struktur Organisasi:

1. Fungsi Pembagian Kerja: Menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas tertentu, sehingga pekerjaan bisa dibagi sesuai dengan keahlian, kapasitas, dan peran masing-masing anggota organisasi.
2. Fungsi Pengarahan dan Koordinasi: Struktur organisasi memberikan jalur komunikasi dan pengawasan yang jelas, yang berguna untuk mengarahkan dan mengoordinasikan seluruh aktivitas organisasi agar berjalan sesuai rencana.
3. Fungsi Kontrol dan Evaluasi: Dengan adanya struktur yang jelas, pimpinan dapat dengan mudah memantau kinerja masing-masing bagian dan melakukan evaluasi atau perbaikan jika terjadi penyimpangan dari tujuan organisasi.
4. Fungsi Penetapan Hubungan Formal: Struktur organisasi menciptakan hubungan kerja yang formal antara atasan dan bawahan, antar departemen, serta antar individu di dalam organisasi sehingga menciptakan tata kelola organisasi yang tertib dan profesional.
5. Fungsi Adaptasi dan Inovasi: Struktur yang fleksibel memudahkan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan serta

mendorong inovasi dalam berbagai bidang operasional. Berikut struktur organisasi CV Hiray Kota Parepare.

Gambar 4. 1 Struktur organisasi CV Hiray Kota Parepare



# BAB V
# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait dengan dampak kebijakan pajak terhadap operasional pada CV Hiray Kota Parepare, Peneliti mandapatkan data dan informasi terkait rumusan masalah pertama yaitu Bagaimana kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah terhadap kegiatan operasional CV Hiray di Kota Parepare. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan melalui proses wawancara memberikan deskripsi mengenai kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah terhadap kegiatan operasional**.**

Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara terhadap 5 informan yang Merupakan Pimpinan, Manajer, Direktur Operasional,Staff Back Office dan kasir CV Hiray Kota Parepare

Tabel 5. 1 Hasil Wawancara Rumusan Masalah Pertama

| No | Narasumber | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|---|
| 1 | Pimpinan CV Hiray | Dapatkah Anda menjelaskan secara singkat aktivitas utama CV Hiray dalam kegiatan | Ya kalau untuk aktivitas sehari-hari, kita fokusnya di usaha makanan dan minuman, jadi lebih ke pengelolaan café dan resto. Setiap hari kita atur stok bahan, bikin jadwal kerja karyawan, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | operasional sehari-hari? | pastikan dapur jalan lancar, dan layani pelanggan yang datang. Kadang juga ada pesanan dari online, jadi kita atur juga bagian delivery-nya. Pokoknya semua kegiatan harian yang nyambung sama pelayanan di café kita awasi terus, dari dapur sampai kasir. |
| 2 | Manajer | Sejauh mana Anda terlibat dalam pengelolaan pajak dan keuangan perusahaan? | Saya tidak urus langsung sampai detail sekali, tapi tetap ikut awasi terutama bagian laporan bulanan. Untuk pajak juga begitu, saya biasanya minta staf keuangan atau admin pajak buat siapkan data dulu, baru nanti saya lihat dan setujui sebelum dilaporkan. Kadang juga konsultasi dulu ke orang pajak luar biar lebih yakin. Soalnya usaha makanan itu kan cepet perputarannya, jadi harus hati-hati juga atur keuangan biar tetap sehat dan tidak nu pajak.” |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Pimpinan CV Hiray | Apa saja jenis pajak yang paling berpengaruh terhadap kegiatan operasional CV Hiray? | Yang paling terasa PPN sama PPh ya. Karena kita jual makanan dan minuman, otomatis kena PPN. Jadi harus rajin input e-faktur segala, belum lagi kalau ada transaksi yang harus dilaporkan per bulan. Terus PPh juga lumayan berpengaruh, apalagi kalau akhir tahun, pas laporan pajak tahunan. Kadang beban pajaknya lumayan terasa, terutama pas omzet lagi naik tapi biaya operasional juga ikut naik. Jadi harus bener-bener kita hitung biar tidak ganggu cash flow. |
| 4 | Pimpinan CV Hiray | Bagaimana perusahaan menyikapi perubahan kebijakan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah? | Ya kalau ada perubahan aturan dari pemerintah, kita biasanya langsung koordinasi sama tim keuangan dan kadang juga tanya ke konsultan pajak. Jujur aja, kadang aturannya suka berubah-ubah, jadi mau mau kita harus cepet-cepet adaptasi. Misalnya |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | waktu aturan soal e-invoicing sama e-filing mulai wajib, ya kita sempat agak bingung, tapi pelan-pelan kita belajar dan sesuaikan sistem. Intinya sih kita berusaha tetap patuh, walaupun kadang memang butuh waktu dan biaya tambahan buat penyesuaian. |
| 5 | Direktur Operasional | Apakah ada perubahan dalam strategi operasional setelah adanya perubahan pajak (misalnya PPh, PPN, atau insentif pajak)? | Iya, tentu ada penyesuaian dalam strategi operasional, khususnya setelah adanya perubahan pada tarif PPN dan pengaturan terkait insentif pajak. Salah satu langkah yang kami ambil adalah melakukan efisiensi dalam proses pengadaan bahan baku dan distribusi produk. Kami juga lebih selektif dalam menentukan vendor, mempertimbangkan aspek perpajakan seperti potensi PPh Pasal 23 atau Pasal 4 ayat (2). Selain itu, kami mulai mengintegrasikan sistem |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | akuntansi operasional dengan sistem perpajakan agar pelaporan menjadi lebih akurat dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Strategi lain yang kami terapkan adalah mengatur ulang komponen harga jual untuk menyesuaikan beban PPN tanpa harus terlalu membebani konsumen. |
| 6 | Direktur Operasional | Bagaimana kebijakan pajak memengaruhi keputusan manajerial atau alokasi anggaran operasional? | Kebijakan pajak sangat memengaruhi pengambilan keputusan di level manajerial, terutama terkait alokasi anggaran. Kami harus mempertimbangkan komponen pajak dalam hampir setiap keputusan pengeluaran, baik itu untuk belanja operasional rutin, pengadaan aset, maupun pengembangan usaha. Misalnya, ketika ada kenaikan tarif PPN, kami harus menyesuaikan struktur biaya operasional agar |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | margin tetap terjaga. Selain itu, insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah juga menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas investasi, karena dapat meringankan beban biaya pada sektor tertentu. Dengan demikian, kebijakan pajak menjadi salah satu faktor penting dalam perencanaan dan eksekusi strategi perusahaan. |
| 7 | Staf Back Office | Apakah ada hambatan administratif atau beban kerja tambahan akibat kebijakan pajak tersebut? | “Ya, cukup terasa ada tambahan beban kerja, terutama dari sisi administratif. Setelah ada kebijakan pajak yang mewajibkan pelaporan secara digital, seperti e-Faktur dan e-SPT, kami harus belajar sistem baru dan menyesuaikan alur kerja harian. Proses input data pajak harus lebih teliti, karena kalau ada kesalahan sedikit saja bisa berdampak pada pelaporan dan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | harus direvisi. Selain itu, kami juga harus menyediakan lebih banyak dokumen pendukung saat pemeriksaan atau pelaporan, seperti faktur pajak, bukti potong, dan laporan keuangan yang sudah disesuaikan. Jadi, dari sisi waktu dan tenaga, memang ada peningkatan beban kerja dibanding sebelumnya. |
| | Kasir CV Hiray | Apakah ada hambatan administratif atau beban kerja tambahan akibat kebijakan pajak tersebut? | “Kalau dari sisi saya sebagai kasir, memang ada tambahan beban kerja, khususnya dalam pencatatan transaksi yang sekarang harus lebih detail dan terintegrasi dengan sistem pajak, seperti pembuatan struk yang sesuai dengan aturan PPN. Kadang juga harus memastikan data penjualan harian sesuai untuk pelaporan pajak. Selain itu, kami juga jadi lebih berhati-hati karena semua transaksi bisa |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | berdampak ke pelaporan bulanan. Jadi memang terasa lebih banyak tanggung jawabnya dibanding sebelumnya, terutama setelah sistem pajaknya makin digital |

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap berbagai pihak di lingkungan CV Hiray, mulai dari pimpinan, manajer, direktur operasional, staf back office, hingga kasir, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perpajakan yang diberlakukan pemerintah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek operasional dan keuangan perusahaan.

Secara umum, aktivitas utama CV Hiray berfokus pada pengelolaan usaha makanan dan minuman, termasuk pengaturan stok bahan baku, jadwal kerja karyawan, layanan pelanggan, hingga pemesanan online. Dalam menjalankan kegiatan ini, perusahaan tidak bisa terlepas dari pengaruh kebijakan pajak, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), yang menjadi jenis pajak paling dominan dalam operasional mereka.

Manajemen CV Hiray, termasuk pimpinan dan direktur operasional, mengakui bahwa setiap perubahan kebijakan pajak, baik dalam bentuk tarif maupun regulasi pelaporan, selalu direspons melalui evaluasi internal, koordinasi dengan tim keuangan, serta konsultasi dengan pihak eksternal seperti konsultan pajak. Penyesuaian strategi operasional pun dilakukan,

mulai dari efisiensi biaya, pemilihan vendor yang mempertimbangkan aspek pajak, hingga pengaturan ulang harga jual agar tidak membebani konsumen namun tetap menjaga margin keuntungan.

Dari sisi pengambilan keputusan, kebijakan pajak juga terbukti memengaruhi alokasi anggaran. Manajemen harus mempertimbangkan aspek perpajakan dalam berbagai keputusan keuangan dan investasi. Insentif pajak yang diberikan pemerintah pun menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun prioritas pengeluaran agar perusahaan tetap mendapatkan keuntungan maksimal dengan beban pajak minimal.

Sementara itu, dari sisi pelaksana teknis, seperti staf back office dan kasir, kebijakan perpajakan menimbulkan beban administratif tambahan. Mereka merasakan peningkatan tanggung jawab dalam hal pencatatan transaksi yang lebih teliti, penggunaan sistem pelaporan digital seperti e-Faktur dan e-SPT, serta kebutuhan untuk menyiapkan dokumen pendukung dalam pelaporan dan pemeriksaan pajak. Kewajiban administratif ini tidak hanya membutuhkan waktu lebih, tetapi juga peningkatan kompetensi teknis dari para pegawai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak memengaruhi CV Hiray dalam dua sisi utama: pertama, pada tingkat strategis dan manajerial melalui penyesuaian strategi operasional dan pengelolaan anggaran; kedua, pada tingkat teknis dan administratif, melalui penambahan beban kerja dan kebutuhan adaptasi terhadap sistem pelaporan perpajakan yang semakin kompleks. Meskipun menambah

tantangan, kebijakan ini juga mendorong perusahaan untuk lebih tertib, efisien, dan profesional dalam mengelola usahanya. Dengan demikian dapat dikemukakan beberapa hal dalam penelitian ini yaitu:

1. Aktivitas Operasional Harian CV Hiray

   CV Hiray adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman, khususnya café dan resto yang beroperasi di Kota Parepare. Dalam kegiatan operasional sehari-hari, aktivitas utama perusahaan berfokus pada penyediaan layanan makanan dan minuman bagi pelanggan yang datang langsung ke tempat maupun melalui layanan daring. Berdasarkan wawancara dengan pimpinan perusahaan, aktivitas rutin mencakup pengelolaan dapur, kontrol stok bahan baku, penjadwalan kerja karyawan, serta pengaturan pelayanan di area café dan kasir. Selain itu, pesanan online dan layanan antar juga menjadi bagian dari kegiatan operasional yang terus berkembang seiring meningkatnya permintaan.

2. Keterlibatan Pimpinan dalam Pengelolaan Pajak dan Keuangan

   Pimpinan CV Hiray menyatakan bahwa meskipun tidak terlibat secara langsung dalam teknis harian pengelolaan pajak dan keuangan, dirinya tetap memantau dan mengevaluasi laporan keuangan secara berkala. Pengambilan keputusan strategis, seperti pengesahan laporan dan konsultasi terkait kewajiban pajak, tetap menjadi tanggung jawab pimpinan. Dalam praktiknya, tim keuangan dan administrasi pajak

bertugas menyiapkan laporan dan data yang dibutuhkan untuk kemudian disetujui oleh pimpinan sebelum dilaporkan ke otoritas pajak.

3. Jenis Pajak yang Paling Berpengaruh terhadap Operasional

   Dari hasil wawancara, diketahui bahwa jenis pajak yang paling berpengaruh terhadap kegiatan operasional CV Hiray adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). PPN berdampak langsung karena produk yang dijual dikenakan pajak konsumsi, sementara PPh memengaruhi beban tahunan perusahaan. Perusahaan harus menyesuaikan sistem pembukuan agar transaksi yang dikenakan PPN dapat dicatat secara akurat dalam pelaporan e-Faktur. Sedangkan PPh, khususnya PPh Badan, menjadi perhatian utama pada saat penutupan buku dan perhitungan laba kena pajak, yang berdampak langsung pada sisa laba bersih perusahaan.

4. Respon Perusahaan terhadap Perubahan Kebijakan Pajak

   Perusahaan menunjukkan respons yang cukup adaptif terhadap perubahan kebijakan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi internal bersama tim keuangan setiap kali terdapat kebijakan baru, baik terkait pelaporan maupun tarif. Selain itu, CV Hiray juga memanfaatkan jasa konsultan pajak eksternal untuk memastikan bahwa seluruh prosedur pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun pada awalnya terjadi kebingungan saat implementasi sistem elektronik seperti e-Faktur dan e-SPT,

perusahaan berhasil beradaptasi melalui pelatihan internal dan pembaruan sistem pencatatan.

5. Perubahan Strategi Operasional Akibat Kebijakan Pajak

   Menurut keterangan Direktur Operasional, adanya perubahan dalam regulasi pajak, khususnya terkait tarif PPN dan mekanisme insentif pajak, menyebabkan perusahaan melakukan penyesuaian pada strategi operasionalnya. Beberapa penyesuaian tersebut antara lain adalah efisiensi pengeluaran operasional, pemilihan supplier yang mempertimbangkan aspek perpajakan, serta penyesuaian harga jual untuk menjaga margin keuntungan. Integrasi sistem keuangan dengan sistem pelaporan pajak juga menjadi prioritas agar perusahaan tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga lebih efisien dan akuntabel.

6. Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Keputusan Manajerial dan Anggaran

   Kebijakan pajak secara signifikan memengaruhi keputusan manajerial, terutama dalam hal perencanaan anggaran. Perusahaan harus memperhitungkan komponen pajak dalam setiap kebijakan belanja dan investasi. Sebagai contoh, dalam menentukan anggaran untuk pembelian bahan baku atau perlengkapan operasional, tim manajemen mempertimbangkan beban PPN yang timbul. Selain itu, insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah juga menjadi pertimbangan dalam menentukan arah ekspansi usaha dan pengadaan aset. Hal ini

menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan telah menjadi faktor penting dalam proses pengambilan keputusan perusahaan.

7. Hambatan Administratif dan Tambahan Beban Kerja

   Dari hasil wawancara dengan staf back office, diketahui bahwa kebijakan pajak juga menimbulkan hambatan administratif, terutama pada masa transisi dari sistem manual ke sistem digital. Penggunaan sistem elektronik seperti e-Faktur dan e-SPT membutuhkan waktu adaptasi, peningkatan kompetensi teknis, serta ketelitian dalam input data. Kesalahan dalam pelaporan dapat menyebabkan revisi berulang dan meningkatkan beban kerja staf. Selain itu, kebutuhan untuk menyusun dokumen pendukung secara lebih lengkap juga menambah pekerjaan administratif, terutama menjelang masa pelaporan bulanan. Meski demikian, staf menyadari bahwa sistem baru ini ke depannya akan memberikan manfaat dalam hal transparansi dan efisiensi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait dengan dampak kebijakan pajak terhadap operasional pada CV hiray kota parepare, Peneliti mandapatkan data dan informasi terkait rumusan masalah kedua yaitu Sejauh mana kebijakan pajak memengaruhi laba bersih yang diperoleh CV Hiray dalam periode tertentu CV Hiray di Kota Parepare. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan melalui proses wawancara memberikan deskripsi mengenai kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah terhadap kegiatan operasional.

Tabel 5. 2 . Hasil Wawancara Rumusan Masalah Kedua

| No | Narasumber | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|---|
| 1 | Pimpinan CV Hiray | Bagaimana perubahan tarif atau peraturan pajak memengaruhi total beban pajak perusahaan? | Perubahan tarif maupun peraturan perpajakan tentu berdampak langsung terhadap total beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Ketika terjadi kenaikan tarif, seperti pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), otomatis biaya yang harus kami keluarkan juga meningkat, terutama karena sebagian besar bahan baku dan operasional kami dikenai pajak. Selain itu, perubahan dalam sistem pelaporan atau ketentuan pemotongan pajak juga turut memengaruhi proses administrasi dan akurasi perhitungan kewajiban pajak, yang pada akhirnya berpengaruh pada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | nominal pajak yang harus dibayarkan.” |
| 2 | Manajer | Apakah terdapat penurunan atau peningkatan laba bersih akibat kebijakan pajak tertentu? | “Ya, kebijakan pajak tertentu memang dapat berdampak pada naik turunnya laba bersih perusahaan. Misalnya, ketika terdapat penyesuaian tarif pajak atau penghapusan insentif tertentu, margin keuntungan kami otomatis terpengaruh. Beban pajak yang lebih besar akan mengurangi laba bersih, terlebih jika tidak disertai dengan peningkatan omzet. Di sisi lain, apabila ada kebijakan insentif pajak dari pemerintah, hal tersebut cukup membantu mengurangi beban usaha dan secara tidak langsung dapat meningkatkan laba bersih. Oleh karena itu, kami selalu berusaha mengikuti perkembangan kebijakan perpajakan dan melakukan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | penyesuaian strategi usaha secara berkala.” |
| 3 | Manajer | Apakah kebijakan perpajakan mengharuskan perusahaan melakukan efisiensi biaya untuk mempertahankan profitabilitas | Ya, kebijakan perpajakan yang berlaku saat ini cukup mendorong kami untuk melakukan efisiensi biaya dalam berbagai aspek operasional. Ketika beban pajak meningkat, baik dari sisi tarif maupun perluasan objek pajak, maka perusahaan harus menyesuaikan agar profitabilitas tetap terjaga. Kami melakukan efisiensi pada biaya operasional yang tidak bersifat prioritas, seperti pengeluaran umum, distribusi, atau pengadaan barang sekunder. Di sisi lain, kami tetap menjaga kualitas produk dan layanan agar loyalitas pelanggan tidak terganggu. Dengan efisiensi yang terencana, kami berupaya menyeimbangkan antara |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | kewajiban perpajakan dan keberlanjutan usaha |
| 4 | Pimpinan CV Hiray | Bagaimana strategi perusahaan dalam menyiasati kebijakan pajak agar tidak terlalu berdampak pada laba? | Strategi yang kami terapkan cukup beragam, namun pada intinya bertujuan agar kewajiban pajak dapat dipenuhi tanpa mengganggu kondisi keuangan perusahaan secara signifikan. Salah satunya adalah dengan melakukan perencanaan pajak (tax planning) secara legal dan sesuai regulasi. Kami juga memanfaatkan insentif atau fasilitas perpajakan yang disediakan oleh pemerintah apabila memenuhi syarat. Selain itu, kami mengoptimalkan pencatatan biaya-biaya operasional yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Kami juga secara rutin berkonsultasi dengan pihak konsultan pajak agar setiap strategi yang diterapkan tetap berada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | dalam koridor hukum dan menghindari risiko sanksi |
| 5 | Direktur Operasional | Apakah perusahaan menerima insentif perpajakan dari pemerintah? Jika ya, bagaimana dampaknya terhadap keuangan perusahaan? | Selama beberapa periode terakhir, perusahaan memang sempat mendapatkan insentif perpajakan dari pemerintah, terutama pada masa pemulihan pasca pandemi. Bentuk insentif tersebut berupa pengurangan pajak terutang dan penundaan kewajiban pelaporan dalam jangka waktu tertentu. Dampaknya cukup positif bagi kondisi keuangan perusahaan, karena memberikan ruang bagi kami untuk mengatur kembali arus kas serta fokus pada pemulihan operasional. Dengan adanya insentif ini, beban keuangan sedikit berkurang dan kami bisa mengalokasikan dana lebih optimal untuk kebutuhan produktif seperti pengadaan bahan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | baku dan peningkatan layanan.” |
| | | Apa harapan Anda terhadap kebijakan pajak di masa mendatang? | Harapan kami ke depan, kebijakan pajak yang diterapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan kondisi riil pelaku usaha di lapangan, khususnya sektor usaha mikro dan menengah seperti kami. Akan sangat membantu jika ada penyederhanaan dalam proses pelaporan dan penghitungan pajak, karena saat ini prosedur administratif cukup kompleks dan menyita waktu. Selain itu, kami berharap adanya kelanjutan dan perluasan insentif pajak bagi sektor produktif, terutama pada masa-masa pemulihan ekonomi. Kebijakan yang stabil, transparan, dan berpihak pada dunia usaha tentu akan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan mendorong pertumbuhan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | usaha secara berkelanjutan. |
| 6 | Pimpinan CV hiray | Apa harapan Anda terhadap kebijakan pajak di masa mendatang? | Kami berharap agar kebijakan pajak di masa mendatang lebih berpihak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk sektor usaha seperti kami di bidang makanan dan minuman. Kebijakan yang bersifat insentif atau penyederhanaan pelaporan akan sangat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus menjaga keberlanjutan usaha. Kami juga berharap ada transparansi dan pendampingan yang lebih aktif dari otoritas pajak, terutama bagi pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami aspek teknis perpajakan. Dengan kebijakan yang ramah terhadap pelaku usaha, maka kepatuhan dan kontribusi pajak tentu |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | akan meningkat secara alami.” |
| 7 | Pimpinan | Menurut Anda, apakah kebijakan pajak yang berlaku saat ini sudah adil dan sesuai untuk perusahaan sekelas CV Hiray | Secara umum, kami memahami bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari kontribusi terhadap negara. Namun, dari sudut pandang pelaku usaha, saya merasa masih ada ketimpangan dalam kebijakan pajak, terutama dalam hal tarif dan perlakuan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Untuk perusahaan sekelas CV Hiray yang masih terus bertumbuh, beban pajak terasa cukup berat jika dibandingkan dengan kapasitas usaha kami. Kami berharap ada penyesuaian tarif atau skema yang lebih proporsional agar beban tersebut tidak menghambat perkembangan usaha. ” |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Manajer | Menurut Anda, apakah kebijakan pajak yang berlaku saat ini sudah adil dan sesuai untuk perusahaan sekelas CV Hiray | Dalam praktiknya, kebijakan pajak saat ini sudah cukup terstruktur, namun dari sisi pelaku usaha menengah seperti kami, ada beberapa aspek yang masih terasa kurang adil. Misalnya, kewajiban administrasi pajak cukup kompleks dan menyita waktu, padahal kami tidak memiliki tim besar untuk menangani itu. Selain itu, meskipun ada fasilitas atau insentif, tidak semua dapat kami akses dengan mudah karena persyaratan teknis yang cukup rumit. Kami berharap pemerintah memberikan kemudahan yang lebih konkret bagi pelaku usaha menengah agar bisa menjalankan kewajiban perpajakan dengan efisien dan tepat waktu.” |
| | Direktur operasional | Menurut Anda, apakah kebijakan pajak yang berlaku | Kalau bicara soal keadilan, saya melihat |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | saat ini sudah adil dan sesuai untuk perusahaan sekelas CV Hiray | bahwa aturan pajak saat ini belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik dan tantangan operasional usaha skala menengah seperti CV Hiray. Kami harus mematuhi sistem dan prosedur yang sama dengan perusahaan besar, padahal kemampuan sumber daya kami terbatas. Hal ini seringkali menambah tekanan operasional, terutama dalam pelaporan dan pemenuhan kewajiban bulanan. Idealnya, ada diferensiasi kebijakan atau kemudahan teknis bagi sektor UMKM agar lebih seimbang dan adil.” |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Staf back office | Menurut Anda, apakah kebijakan pajak yang berlaku saat ini sudah adil dan sesuai untuk perusahaan sekelas CV Hiray | Dari sisi pelaksana, saya merasa aturan pajak sekarang cukup memberatkan, khususnya dalam hal administrasi. Pelaporan pajak seperti e-Faktur dan e-SPT butuh ketelitian tinggi, dan kalau ada kesalahan sedikit, bisa berpengaruh ke keseluruhan laporan. Kadang kami juga merasa kurang mendapat informasi atau sosialisasi yang jelas soal perubahan aturan. Jadi, kalau ditanya adil atau tidak, mungkin masih perlu diperbaiki supaya lebih mudah diterapkan untuk |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | perusahaan kecil dan menengah seperti kami. |

Berdasarkan Hasil wawancara dengan beberapa pihak internal di CV Hiray menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan pemerintah memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap operasional dan kinerja keuangan perusahaan. Terutama, perubahan tarif dan peraturan perpajakan berdampak langsung terhadap total beban pajak perusahaan. Hal ini disampaikan oleh pimpinan CV Hiray yang menyebutkan bahwa ketika terjadi kenaikan tarif seperti PPN, maka biaya operasional juga meningkat karena sebagian besar kebutuhan bahan baku terkena pajak. Selain itu, perubahan dalam sistem pelaporan seperti e-Faktur atau ketentuan pemotongan pajak turut menambah kompleksitas administrasi dan memengaruhi keakuratan perhitungan pajak, yang pada akhirnya berdampak pada nominal pajak terutang.

Dari sisi manajerial, manajer CV Hiray menyampaikan bahwa kebijakan pajak berdampak langsung pada naik turunnya laba bersih perusahaan. Kenaikan tarif atau penghapusan insentif tertentu menyebabkan margin keuntungan menurun apabila tidak dibarengi dengan peningkatan omzet. Sebaliknya, ketika pemerintah memberikan insentif pajak seperti pengurangan atau penundaan pembayaran, maka beban usaha berkurang dan berpotensi meningkatkan laba. Oleh karena itu, pihak manajemen selalu memantau perkembangan kebijakan perpajakan dan

menyesuaikan strategi usaha secara berkala untuk menjaga kestabilan keuangan.

Kebijakan pajak juga memaksa perusahaan untuk lebih cermat dalam melakukan efisiensi biaya agar profitabilitas tetap terjaga. Manajer operasional menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan pada komponen biaya yang dianggap tidak prioritas seperti pengeluaran umum dan barang sekunder, sambil tetap menjaga kualitas layanan agar tidak kehilangan pelanggan. Strategi ini menunjukkan bagaimana perusahaan menyeimbangkan antara kewajiban pajak dan keberlangsungan bisnis secara berkelanjutan.

Pimpinan CV Hiray menambahkan bahwa salah satu strategi utama yang digunakan untuk menyiasati kebijakan pajak adalah perencanaan pajak (tax planning) secara legal, serta memanfaatkan insentif dan mencatat biaya operasional secara optimal untuk pengurang penghasilan kena pajak. Langkah ini didukung oleh konsultasi rutin dengan pihak eksternal seperti konsultan pajak agar tetap berada dalam koridor hukum yang benar dan terhindar dari sanksi.

Direktur operasional CV Hiray menyatakan bahwa perusahaan sempat menerima insentif pajak selama masa pemulihan pascapandemi, berupa pengurangan pajak terutang dan penundaan pelaporan. Insentif ini sangat membantu kondisi keuangan karena memberikan ruang bagi perusahaan untuk memperbaiki arus kas dan mengalokasikan anggaran ke sektor produktif seperti peningkatan layanan dan pembelian bahan baku.

Terkait harapan terhadap kebijakan pajak di masa depan, baik pimpinan maupun direktur operasional berharap pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih sederhana, adil, dan berpihak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka menekankan pentingnya penyederhanaan proses pelaporan dan pemberian insentif yang lebih mudah diakses, serta adanya pendampingan langsung dari otoritas pajak bagi pelaku usaha yang belum memahami sepenuhnya teknis perpajakan. Kebijakan yang stabil dan pro-UMKM diyakini akan meningkatkan kepatuhan sekaligus mendorong pertumbuhan usaha secara lebih sehat.

Dalam hal persepsi terhadap keadilan kebijakan pajak, mayoritas informan menyampaikan bahwa sistem perpajakan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya adil bagi perusahaan sekelas CV Hiray. Pimpinan perusahaan menyoroti bahwa tarif dan perlakuan pajak saat ini cenderung masih memberatkan pelaku UMKM, terutama karena mereka harus memenuhi prosedur yang sama seperti perusahaan besar. Manajer juga menambahkan bahwa persyaratan administrasi cukup kompleks dan menyita waktu, apalagi tim mereka tidak besar. Hal ini mengakibatkan efisiensi kerja terganggu karena harus mematuhi ketentuan administratif yang detail.

Direktur operasional menggarisbawahi bahwa karakteristik dan tantangan operasional usaha menengah belum sepenuhnya diperhitungkan dalam sistem perpajakan saat ini. Sebaliknya, staf back office dari sisi pelaksana teknis mengeluhkan beratnya beban administratif dalam

pelaporan, termasuk ketelitian tinggi dalam penggunaan e-SPT dan e-Faktur, serta minimnya sosialisasi dari otoritas pajak mengenai perubahan aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun tujuan kebijakan adalah peningkatan kepatuhan dan akuntabilitas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan besar terutama untuk usaha berskala menengah.

Secara keseluruhan, narasi ini mencerminkan bahwa CV Hiray sebagai pelaku UMKM merespons kebijakan perpajakan dengan serius dan berusaha adaptif. Namun, mereka juga berharap adanya perbaikan dan keberpihakan lebih besar dari pemerintah agar sistem perpajakan dapat dijalankan secara efisien, adil, dan mendukung pertumbuhan usaha.

Berdasaarkan hasil wawancara diatas maka dapat dikemukakan beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:

1. Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Kegiatan Operasional CV Hiray kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah berpengaruh terhadap kegiatan operasional CV Hiray, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha makanan dan minuman di Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dan beberapa jajaran manajemen perusahaan, kebijakan pajak dinilai memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek operasional perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pimpinan CV Hiray menyampaikan bahwa perubahan kebijakan pajak, seperti penyesuaian tarif PPN maupun ketentuan pelaporan elektronik, menyebabkan

perusahaan harus menyesuaikan sistem keuangan dan administrasi. Beban pajak yang meningkat mendorong perusahaan untuk lebih cermat dalam mengatur pengeluaran dan merancang strategi operasional yang efisien. Perusahaan juga lebih berhati-hati dalam memilih pemasok, menyusun anggaran belanja, dan menetapkan harga jual, agar tetap dapat menjaga profitabilitas di tengah kewajiban pajak yang terus berkembang.

2. Dampak Kebijakan Pajak terhadap Laba Bersih Perusahaan Kebijakan perpajakan terbukti memberikan pengaruh langsung terhadap laba bersih yang diperoleh perusahaan. Pimpinan CV Hiray menjelaskan bahwa kenaikan tarif pajak atau penghapusan insentif pajak sering kali berdampak pada menurunnya margin keuntungan. Dalam beberapa periode, beban pajak yang lebih tinggi menyebabkan laba bersih perusahaan mengalami penurunan, karena sebagian besar biaya tambahan tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada konsumen. Sebaliknya, ketika perusahaan mendapatkan insentif pajak, seperti pengurangan tarif atau relaksasi pelaporan, hal tersebut memberikan ruang fiskal yang lebih luas, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kondisi laba.
3. Efisiensi Biaya sebagai Dampak Kebijakan Pajak Direktur Operasional CV Hiray menyampaikan bahwa kebijakan perpajakan yang berlaku saat ini membuat perusahaan harus melakukan efisiensi biaya untuk menjaga profitabilitas. Efisiensi dilakukan pada berbagai pos pengeluaran yang

dinilai tidak terlalu krusial terhadap kualitas layanan. Langkah ini dilakukan untuk mengimbangi peningkatan beban pajak dan memastikan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan secara optimal. Dengan melakukan penghematan yang terencana, perusahaan mampu menjaga stabilitas usaha meskipun dalam tekanan regulasi perpajakan yang ketat.

4. Strategi Perusahaan dalam Menyikapi Dampak Pajak terhadap Laba
   Dalam menghadapi kebijakan pajak yang berpotensi memengaruhi kondisi keuangan, perusahaan menerapkan sejumlah strategi. Pimpinan CV Hiray menegaskan bahwa perusahaannya mengutamakan perencanaan pajak (tax planning) yang legal dan sesuai aturan. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan pencatatan biaya-biaya operasional sebagai komponen pengurang pajak, serta memanfaatkan insentif yang disediakan pemerintah apabila memenuhi syarat. Di samping itu, perusahaan secara rutin melakukan konsultasi dengan konsultan pajak eksternal untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan telah dilaksanakan dengan benar dan efisien.
5. Pemanfaatan Insentif Pajak dan Dampaknya terhadap Keuangan
   Direktur Operasional CV Hiray mengungkapkan bahwa perusahaan pernah memperoleh insentif perpajakan dari pemerintah, terutama selama masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Bentuk insentif tersebut antara lain berupa pengurangan pajak terutang dan keringanan dalam pelaporan. Dampak dari insentif ini dirasakan cukup besar karena

membantu perusahaan mengatur ulang arus kas, sehingga dana yang tersedia dapat digunakan untuk kegiatan produktif lainnya. Insentif juga memberikan kelegaan pada sisi keuangan perusahaan yang sedang dalam proses stabilisasi setelah tekanan ekonomi.

6. Harapan terhadap Kebijakan Pajak di Masa Mendatang Baik pimpinan maupun direktur operasional menyampaikan harapan agar kebijakan perpajakan di masa depan dapat lebih memperhatikan kondisi usaha kecil dan menengah seperti CV Hiray. Mereka menginginkan adanya penyederhanaan prosedur pelaporan dan penghitungan pajak, serta pemberian insentif yang lebih mudah diakses. Selain itu, mereka berharap agar ada pendampingan aktif dari otoritas pajak, khususnya dalam bentuk sosialisasi yang rutin dan edukatif, sehingga pelaku usaha tidak hanya patuh terhadap kewajiban, tetapi juga memahami dengan baik dasar-dasar kebijakan yang diterapkan.
7. Persepsi terhadap Keadilan Kebijakan Pajak yang Berlaku Terkait dengan persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan saat ini, masing-masing informan memiliki pandangan yang relatif serupa. Pimpinan CV Hiray menilai bahwa sistem perpajakan masih belum sepenuhnya adil bagi pelaku usaha menengah. Tarif dan prosedur yang berlaku saat ini dianggap lebih cocok untuk perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang memadai. Hal senada juga disampaikan oleh manajer keuangan, yang merasa bahwa kompleksitas administratif dalam pelaporan pajak cukup membebani perusahaan. Direktur operasional

menambahkan bahwa penerapan sistem yang sama untuk semua skala usaha menyebabkan ketidakseimbangan, terutama dalam hal kemampuan teknis dan finansial untuk memenuhinya. Sementara itu, staf back office menyampaikan bahwa dari sisi pelaksana, beban administratif yang tinggi dan minimnya sosialisasi teknis menjadi hambatan tersendiri. Mereka berharap adanya perbaikan sistem dan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi perusahaan kecil dan menengah.

## B. Pembahasan

1. Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Kegiatan Operasional CV Hiray

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak pemerintah secara nyata memengaruhi kegiatan operasional CV Hiray. Teori kepatuhan pajak menyebut bahwa regulasi administrasi dan finansial mendorong perusahaan untuk menyesuaikan metode manajemen internal dan operasionalnya. Hal ini tercermin dari upaya CV Hiray dalam menerapkan sistem pencatatan digital, pemilihan vendor yang lebih efisien, dan pengelolaan stok yang lebih tertata, sebagai respons terhadap perubahan tarif PPN dan kewajiban pelaporan digital seperti e-Faktur dan e-SPT. Dalam konteks operasional, Wibowo (2024) menyatakan bahwa strategi manajemen pajak yang efektif, termasuk pemanfaatan insentif dan dokumentasi biaya secara sistematis, meningkatkan efisiensi biaya operasional perusahaan manufaktur .

Efisiensi Biaya sebagai Dampak dari Beban Pajak yang Meningkat Temuan menunjukkan adanya dorongan strategis untuk melakukan efisiensi setelah kenaikan tarif pajak. CV Hiray melakukan pemangkasan biaya operasional non-kritis, tanpa mengorbankan kualitas layanan, sebagai bentuk penerapan strategi *cost leadership*. Pendekatan ini mencerminkan praktik yang lazim diadopsi UMKM untuk menjaga profitabilitas saat menghadapi tekanan regulasi finansial. Wibowo (2024) menyoroti bahwa struktur pajak yang direncanakan (tax planning) dan pemanfaatan insentif merupakan faktor penting peningkatkan efisiensi operasional. Ditemukan juga efek positif jangka panjang berupa kemampuan reinvestasi dan peningkatan produktivitas, sejalan temuan yang melibatkan tax avoidance dan produktivitas pada UMKM di Spanyol .

Dalam jurnal yang di tulis oleh Sumiok (2024) dalam *Analyzing the Impact of Tax Policy on Financial Performance and Compliance of MSMEs in Indonesia* (Sinergi International Journal of Accounting and Taxation) menemukan bahwa tingginya tarif pajak berbanding terbalik dengan profitabilitas, sementara insentif pajak memiliki korelasi positif terhadap kinerja keuangan UMKM.

2. Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Laba Bersih CV Hiray

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara mendalam dengan manajer, pimpinan, dan direktur operasional CV Hiray, ditemukan bahwa kebijakan pajak sangat memengaruhi laba

bersih perusahaan, baik secara langsung dalam bentuk beban fiskal maupun secara tidak langsung melalui strategi penyesuaian biaya dan perencanaan usaha. Secara teori, temuan ini dapat dijelaskan melalui pendekatan teori agensi dan teori perilaku perusahaan. Teori agensi menyatakan bahwa manajemen perusahaan (agen) akan mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan selama kebijakan fiskal (termasuk pajak) tidak menimbulkan konflik dengan kepentingan pemilik usaha (principal). Ketika kebijakan pajak menjadi terlalu membebani, maka manajemen akan mencari cara efisien untuk mengurangi tekanan tersebut melalui tax planning dan pengendalian biaya operasional.

temuan Sumiok (2024) dalam jurnal *Sinergi International Journal of Accounting and Taxation*, yang menyatakan bahwa "tingginya tarif pajak berbanding terbalik dengan profitabilitas, sementara insentif pajak memiliki korelasi positif terhadap kinerja keuangan UMKM. CV Hiray menerima insentif pajak dari pemerintah, seperti pengurangan tarif PPh Final dan relaksasi pelaporan pasca pandemi, dampaknya cukup signifikan terhadap peningkatan laba bersih. Direktur operasional menjelaskan bahwa insentif ini memberi ruang bagi perusahaan untuk mengatur arus kas secara lebih fleksibel dan fokus pada pemulihan operasional. Ini menunjukkan bahwa insentif fiskal tidak hanya membantu dari sisi kepatuhan, tetapi juga memperkuat kapasitas keuangan jangka pendek perusahaan.

Temuan ini selaras dengan Prasetyo & Rachmawati (2022) dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, yang menunjukkan bahwa insentif pajak meningkatkan efisiensi keuangan dan memberikan ruang ekspansi bagi UMKM yang terdampak pandemi. Selain itu, kebijakan pajak yang bersifat mendukung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mikro dan menengah secara sistemik.

perusahaan seperti CV Hiray melakukan penyesuaian strategi melalui efisiensi biaya operasional, tanpa menurunkan kualitas layanan. Ini sesuai dengan teori manajemen biaya (cost management theory) yang menyatakan bahwa perusahaan akan menyeimbangkan beban eksternal (termasuk pajak) dengan penghematan internal untuk mempertahankan laba bersih. CV Hiray mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak terlalu berdampak terhadap produktivitas, seperti biaya umum, distribusi sekunder, dan belanja operasional non-prioritas. Pendekatan ini juga didukung oleh Gunawan (2022) dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, yang menyatakan bahwa UMKM cenderung melakukan efisiensi sebagai respons adaptif terhadap tekanan fiskal, karena mereka memiliki keterbatasan modal dan tidak mampu menahan beban keuangan jangka panjang.

Dalam penelitian Sugiharto & Rahman (2023) dalam *Jurnal Pajak dan Strategi Fiskal*, yang menyebutkan bahwa tax planning bukan sekadar cara untuk menghindari pajak, tetapi bagian dari manajemen risiko keuangan yang penting bagi kelangsungan usaha kecil dan

menengah. Adapun secara normatif, narasumber dari berbagai tingkat manajemen CV Hiray menyatakan bahwa sistem perpajakan saat ini belum sepenuhnya adil bagi usaha menengah. Mereka harus mengikuti sistem pelaporan dan pelunasan pajak yang rumit, layaknya perusahaan besar, namun dengan sumber daya manusia dan teknologi yang terbatas. Kesulitan ini menambah beban psikologis dan operasional yang secara tidak langsung juga memengaruhi kemampuan perusahaan menjaga laba bersihnya.

Pernyataan ini sejalan dengan temuan Putri & Sudrajat (2023) dalam *Jurnal Administrasi Bisnis*, yang menemukan bahwa 68% pelaku UMKM merasa bahwa sistem administrasi pajak di Indonesia masih terlalu rumit dan tidak ramah pelaku usaha kecil.

# BAB VI

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif terhadap CV Hiray, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai beriku:

1. Kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah memberikan pengaruh langsung terhadap kegiatan operasional CV Hiray. Perubahan dalam tarif dan sistem pelaporan pajak mendorong perusahaan untuk melakukan penyesuaian dalam sistem pencatatan keuangan, pengelolaan stok, serta efisiensi anggaran operasional. Selain itu, kebijakan perpajakan juga berdampak pada beban kerja staf administrasi, khususnya dalam memenuhi ketentuan pelaporan yang semakin berbasis digital. Meski menambah kompleksitas, hal ini juga mendorong perusahaan untuk mengelola usahanya secara lebih tertib dan professional
2. Kebijakan pajak turut memengaruhi kondisi laba bersih perusahaan. Kenaikan tarif pajak dan penghapusan insentif dapat menurunkan margin keuntungan, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan omzet. Sebaliknya, ketika pemerintah memberikan insentif atau keringanan pajak, perusahaan merasakan dampak positif dalam bentuk keringanan beban keuangan dan perbaikan arus kas. Oleh karena itu, manajemen CV Hiray memandang penting untuk menyusun

perencanaan pajak yang tepat agar dampak negatif kebijakan fiskal dapat diminimalkan, dan laba perusahaan tetap terjaga

## B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi CV Hiray
   a. Disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas tim keuangan dan administrasi dalam memahami kebijakan perpajakan terbaru, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi pelaporan.
   b. Perusahaan juga sebaiknya lebih proaktif dalam mengakses informasi terkait insentif atau fasilitas perpajakan yang disediakan oleh pemerintah, agar dapat memanfaatkannya secara optimal.
   c. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap struktur biaya dan strategi harga jual untuk menjaga margin keuntungan meskipun beban pajak meningkat.
   d. Disarankan kepada pemilik untuk merekrut tim keuangan minimal lulusan S1 Akuntansi atau D3 Perpajakan agar pengelolaan keuangan perusahaan lebih terstruktur, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan
2. Bagi Pemerintah atau Otoritas Pajak:
   a. Perlu adanya pendekatan yang lebih ramah terhadap pelaku usaha kecil dan menengah, seperti penyederhanaan prosedur

pelaporan, peningkatan sosialisasi kebijakan, dan pendampingan teknis secara berkala.

b. Pemerintah juga disarankan untuk terus menyesuaikan kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan kondisi riil pelaku usaha, agar kebijakan yang diterapkan tidak menjadi beban berlebih yang justru menghambat pertumbuhan sektor UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA


Amiruddin., Roni Priyanda., Tri Siwi Agustina., dkk, 2022, *Metode Penelitian kuantitatif*, (Jawa Tengah: Pradina Pustaka),

Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2004). Management Control Systems (11th ed.). McGraw-Hill.

Akhsan, A., Ladung, F., & Nurfazila, N. (2021). ANALISIS PENGARUH BAHAN BAKU , MODAL DAN TENAGA KERJA TERHADAP PRODUKSI BATU NISAN DI KECAMATAN RAPPANG Analysis of the Effect of Raw Materials , Capital and Labor on Tombstone. *Cateris Paribus Journal Volume*, *1*(September), 66–74.

Arifin, Z. (2014). *Kebijakan Fiskal: Teori dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ayief Fathurrahman, "Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi islam : Studi Kasus dalam Mengentaskan kemiskinan", Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 13 No. 1, 2012

Baharuddin, Ladung, F., & Asrindah. (2022). ANALISIS POTENSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERGESERAN STRUKTUR PEREKONOMIAN DI KABUPATEN PANGKEP. *Cateris Paribus Journal Volume*, *2*(September), 39–47.

Chase, R. B., Aquilano, N. J., & Jacobs, F. R. (2006). Operations Management for Competitive Advantage. McGraw-Hill.

Eko Suprayitno, Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005),

Fahmi, I. (2018). Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Alfabeta.

Fayol, H. (1916). General and Industrial Management. Pitman Publishing.

Fitriani, Bahruddin, & Rubia. (2023). PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KINERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. PINRANG The. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *4*, 43–49.

Heizer, J., & Render, B. (2015). Operations Management (11th ed.). Pearson Education.

Husni Muharram Ritonga., Dewi Nurmasari Pane., dan Citra Anita Rahmah, 2021 "*Kerangka Konseptual Dalam Akuntansi*"*jurnal ilmiah multi disiplin indonesia,*

Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan. IAI.

Imam Santoso dan Harries Madiistiyatno, 2021 "*metodologi penelitian kuantitatif" ,* Tangerang: indigo Media.

Isna Ardila Dan Ayu Anindya Putri, Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Volume 15 No.1/ Maret 2015

Jannah, B. P. dan L. miftahul. (2016). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *PT Rajagrafindo Persada* (Vol. 3, Issue 2).

Juliansyah Noor, 2017 *"metode penelitian",* (Jakarta: fajar interpratama Mandiri),

Karimuddin Abdullah, dkk,2021, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kori Puspita Ningsi, dkk, 2022, *Metodologi Penelitian Kuantitatif,* (Sukoharjo: CV. Pradina Pustaka Grup,

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th ed.). Pearson Education.

M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Ekonomi Islam, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011),

Mahmudi. (2019). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:Andi.

Mardiasmo. 2009. Perpajakan, edisi revisi tahun 2009.Yogyakarta: Andi.

Marius Masri, Tesis: "Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Regional Terhadap Inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Periode 2001-2008)", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010)

Mulyadi. (2016). Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Salemba Empat.

Mulyani, S. I. (2017). *Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian Nasional: Studi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2006)

Noer Saleh Musannef, 1988, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: Gunung Agung),

Reksoprayitno, Soediyono. 1985. Pengantar analisa pendapatan nasional. Yogyakarta. Liberty.

Ricardo, D. (1817). On the Principles of Political Economy and Taxation. John Murray.

Schroeder, R. G., Clark, M. W., & Cathey, J. M. (2011). Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases. Wiley.

Sofian Siregar, 2017, *Metodologi Penelitian Kuantitatif,* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri),

Sugiyono,2024 . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung :Alfabeta,

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi,2013, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia

Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, (KBM Indonesia: Universitas Medan Area, 2021),

Syamsi, Ibnu, 1986. Pokok-PokokKebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional. Jakarta: CV. Rajawali

Telisa Aulia Falianty, Teori Ekonomi Makro dan penerapannya di Indonesia, (Depok: Rajawali Pers, 2019)

Telisa Aulia Falianty, Teori Ekonomi Makro dan penerapannya di Indonesia, (Depok: Rajawali Pers, 2019)

Tia Aulia, *Teknik Aanalisis Data: Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnya,* https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/, Akses pada tanggal (13 April 2023).

T, R., Bahruddin, B., & Mica, M. (2023). Kontribusi Sub Sektor Perhotelan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2017. *Cateris Paribus Journal*, *1*(2), 51–57. https://doi.org/10.31850/cpj.v1i2.1480

Vera, S. S. (2020, Maret). *Modul Manajemen Operasional* [Modul pembelajaran]. Universitas Suryadarma.

Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2023, June 26). *Operations Management* (Latest ed.). Pearson Education.

Stevenson, W. J. (2020, January 15). *Operations Management* (14th ed.). McGraw-Hill Education

Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Kit*: Definisi laba — peningkatan manfaat ekonomi. *Karimah Tauhid: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, 3(10), 11066–11067.

Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. E. (2020). Profit as the positive difference between revenues and expenses. In *Financial and Managerial Accounting* (Edisi terkini). Cengage.

Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). *Operations management* (13th ed.). New York, NY: